

## DAFTAR PUSTAKA

- (2020, November 13). Dipetik 24 April, 2022, dari buk.um.ac.id: <http://buk.um.ac.id/2020/11/workshop-rekonsiliasi-penyerahan-piutang-negara/>
- Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan Dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 78-89.
- Artanti, N. P. (2021, Desember 27). *djkn.kemenkeu.go.id*. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/14544/Crash-Program-pada-KPKNL-Malang-turut-Memperjuangkan-Cita-Cita-Pendidikan-Tinggi-para-Mahasiswa.html>
- Chorib, S., Boedirijanto, & Pardede, A. (2005). *Pengurusan Piutang Negara*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Irianto, K. B. (2022, Februari 7). *cnc indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.cncindonesia.com/opini/20220207112943-14-313385/enterprising-the-government-sebuah-siasat-dalam-keterbatasan>
- Keringanan Utang, Bentuk Empati Negara di Masa Pandemi. (2021). *Media Kekayaan Negara edisi Nomor 38*, 21-24.
- Masitoh, S. (2021, Agustus 12). Diambil kembali dari [nasional.kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/ini-capaian-program-keringanan-utang-pada-semester-i-2021](https://nasional.kontan.co.id/news/ini-capaian-program-keringanan-utang-pada-semester-i-2021)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum*. (2020).

*Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021. (t.thn.).*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (t.thn.).*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara. (t.thn.).*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Piutang Negara. (t.thn.).*

Polii, F. P., Pangemanan, S. S., & Lambey, R. (2021). Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. *Jurnal EMBA Vol. 9 No. 1*, 841 - 850.

Pramono, S. B. (2021, Februari 15). *kemenkeu.co.id*. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca-artikel/13693/Ekspektasi-Peran-Aktif-Anggota-PUPN-Dalam-Penyelesaian-Pengurusan-Piutang-Negara.html>

Radytia, A. A. (2019, Februari 20). Diambil kembali dari [djkn.kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12765/Pengurusan-Piutang-Negara-Khusus.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12765/Pengurusan-Piutang-Negara-Khusus.html)

- Sobandi, B. (2019). Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widya*, 1-11.
- Triarisandy, R. (2018). Prosedur Pengeluaran Kas untuk Piutang di Primer Koperasi Kepolisian Resor Boyolali. 15.